

# ANTICORRUPTION GUIDELINES

KPK ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

IPI MARYATI KUDING

DIRECTORATE OF ANTI-CORRUPTION IN BUSINESS ENTITIES  
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA (KPK)

**CEK** ✓

**PANDUAN**

**CEGAH**

**KORUPSI**

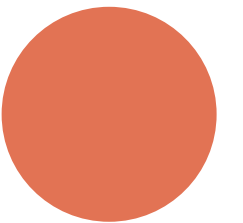
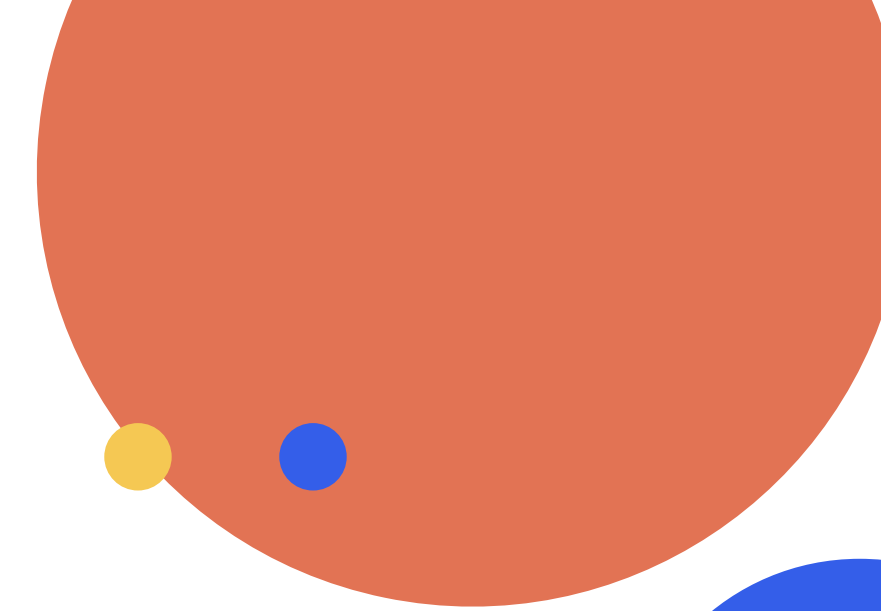
UNTUK DUNIA USAHA



## Corruption Eradication Commission - KPK OVERVIEW



- Independent from the Executive, Legislative, Judiciary and any other powers
- Responsible to the Public
- Financially, KPK is audited by the Indonesian Supreme Audit Board (BPK)
- Investigation and Prosecution power
- Supervise & Coordinate Attorney General Office & National Police in handling Corruption cases
- 5 Commissioners
- 1900++ officers



# The Authorities



## Investigation and Prosecution

- Grand Corruption Cases
- **Corruption involving law enforcement officers**
- Money laundering where corruption as predicate crime

## Prevention

- Asset Disclosure Management
- Anti Corruption Campaign and socialization
- Gratuity Reporting System
- Education entire levels of education
- Corruption Prevention for Business entities

## Monitoring

- Government system risk assessment
- System improvement Recommendation

## Coordination Supervision

- Coordinate and supervise other law enforcement agencies on corruption investigation and prosecution
- Coordinate and supervise other agencies/ministries on corruption prevention



## CORRUPTION CASES HANDLED BY KPK

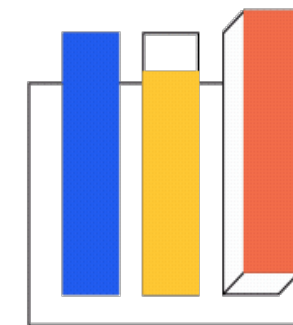
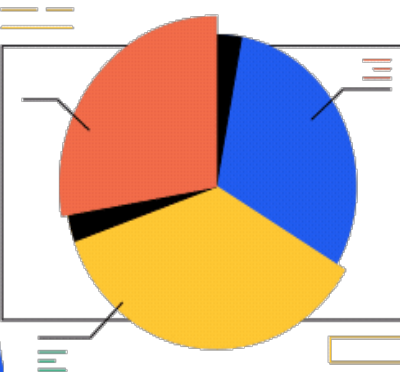
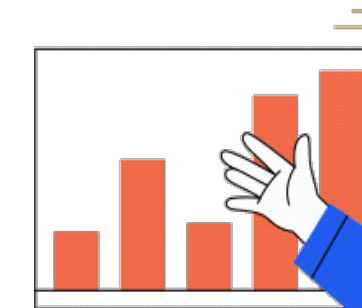
As of per 2004 – May 2024



**456**

**Offenders** from private sectors

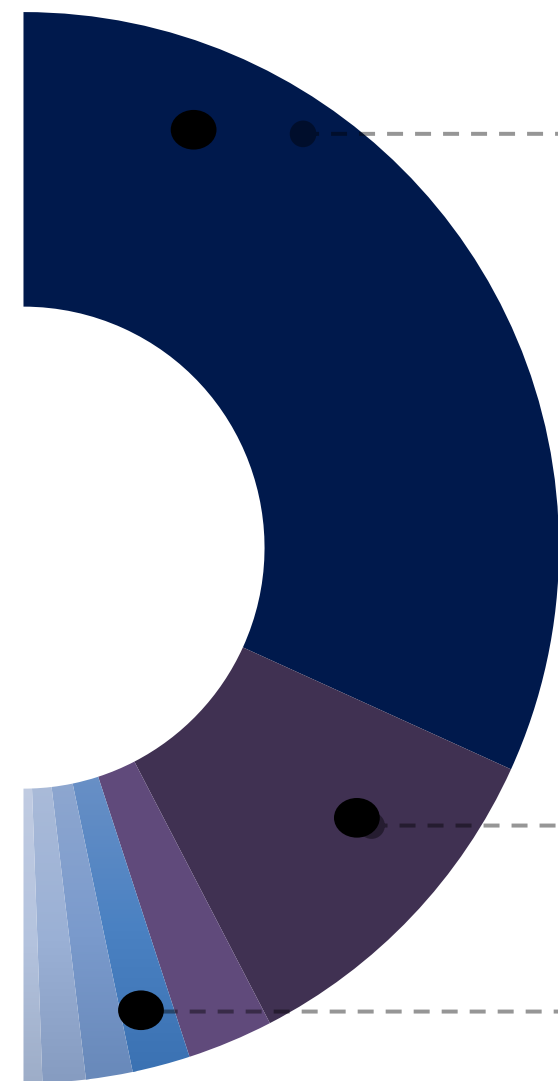
**8 Corporations**





# CORRUPTION CASES HANDLED BY KPK

As of per 2004 s.d May 2024



1.022

● BRIBERY



383

● PROCUREMENT



57

● BUDGET MISUSE

64

● MONEY LAUNDERING

38

● EXTORTION

28

● LICENSING

13

● OBSTRUCTION OF JUSTICE



# PREVENTION

**Supply**

**Private**



**Demand**

**Executive  
Legislative  
Judicial**



# Initiative Programs of Anti-Bribery & Illegal Gratuity in Private Sector

1. To form and build Agent of Change of Anti-Corruption in private sector (corporation, business association, chambers of commerce, etc)

## National Advisory Committee

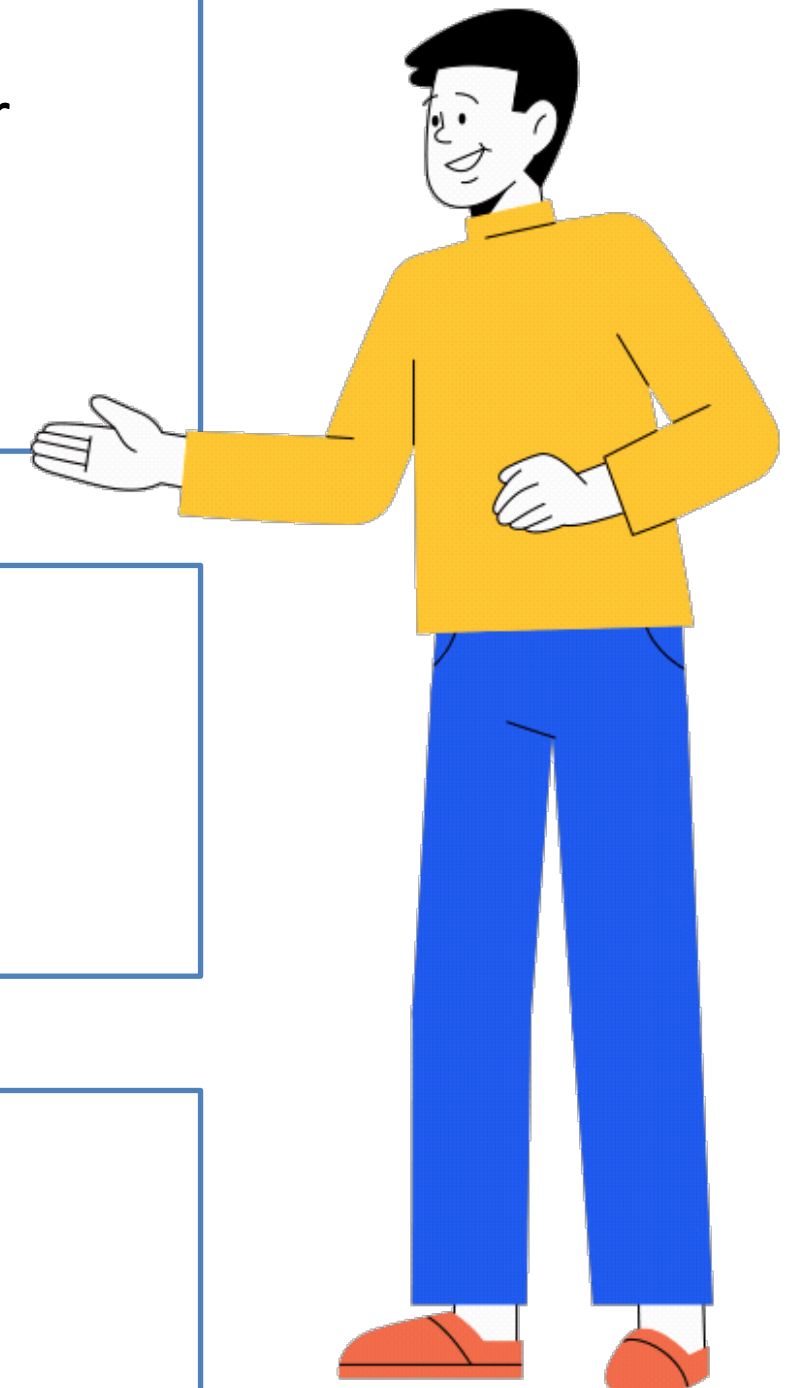
- Regulators, Business Associations, & Indonesian Chamber of Commerce
- 6 Sectors: Infrastructure, Manufacture, Oil & Gas, Forestry, Food Security, Mining

## Regional Advisory Committee

- Local Government & Chamber of Commerce in Province level
- 34 Provinces; with legal Standing from local government

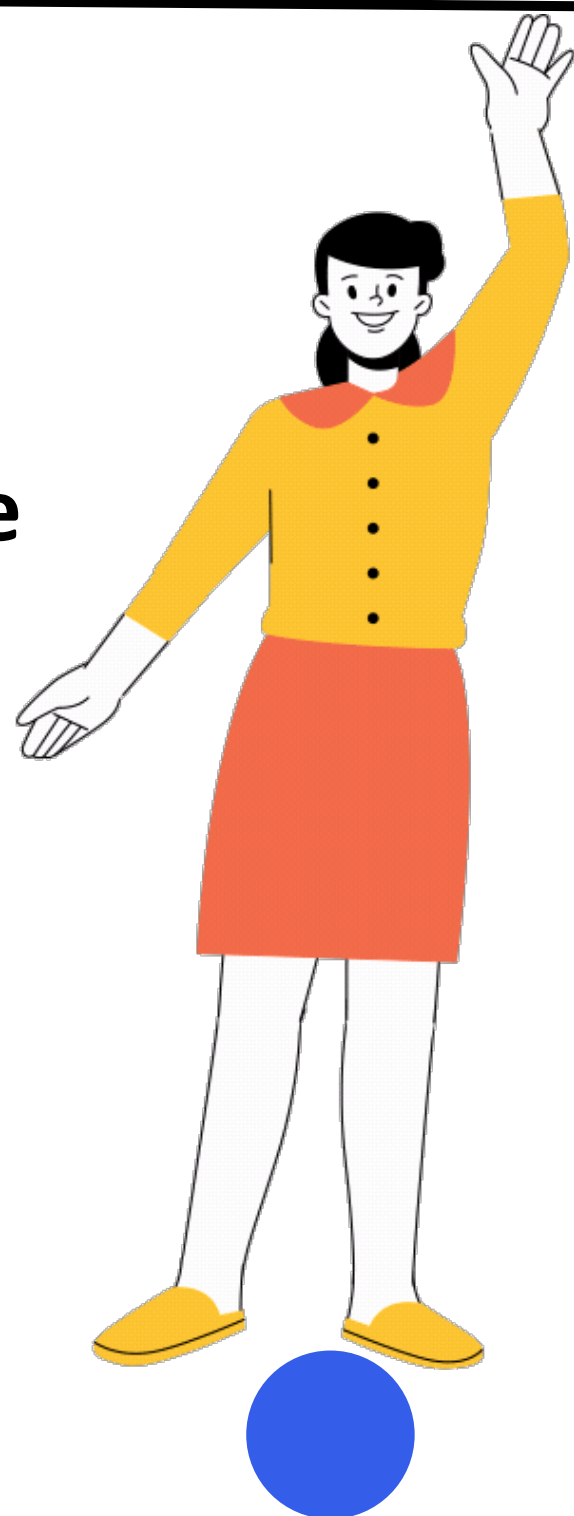
## Certified Integrity Officer

- KADIN Indonesia
- Companies



# Initiative Programs of Anti-Bribery & Illegal Gratuity in Private Sector

**2. To promote and facilitate collective actions to combat corruption in private sectors.**



Establishing Adequate Measures based on Supreme Court Rule "PERMA" No.13/2016

Anticorruption Management System Guideline Apps

Communications Strategy to raising awareness of Anti-bribery & Illegal gratuity Nationwide



# MEASURES

## International

- FCPA
- UKBA
- OECD Principle
- UN Global Compact
- ISO 37001:2016

## National

- SNI ISO 37001:2016
- Good Corporate Governance
- Adequate Measures Guideline based on Supreme Court Rule "PERMA" No.13/2016



1. Commitment
2. Plan
3. Do
4. Check
5. Action
6. Response

Effectively implemented with **TONE FROM THE TOP**

# LEVEGARE

## MoU with Indonesia Chamber of Commerce & Industry on Partnership in Corruption Eradication Efforts

### NOTA KESEPAHAMAN

#### ANTARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

#### DENGAN

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

NOMOR : 160 Tahun 2021

NOMOR : MOU/184/DP/XI/2021

#### TENTANG

#### KERJA SAMA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 25 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25 -11- 2021) oleh dan antara:

- I. **FIRLI BAHURI**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019 - 2023, berkedudukan di Gedung KPK Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "KPK".
- II. **M. ARSJAD RASJID P. M.**, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "KADIN Indonesia".

KPK dan KADIN Indonesia untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

- c. pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi;
- d. sosialisasi dan kampanye;
- e. pelaksanaan dan penerapan hasil kajian/penelitian; dan
- f. kegiatan lain berkaitan dengan program pemberantasan korupsi di sektor yang disepakati oleh Para Pihak.

#### PASAL 3 PERTUKARAN INFORMASI DAN/ATAU DATA

- (1) Para Pihak dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Pihak sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing Pihak.
- (2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik sesuai kesepakatan Para Pihak.

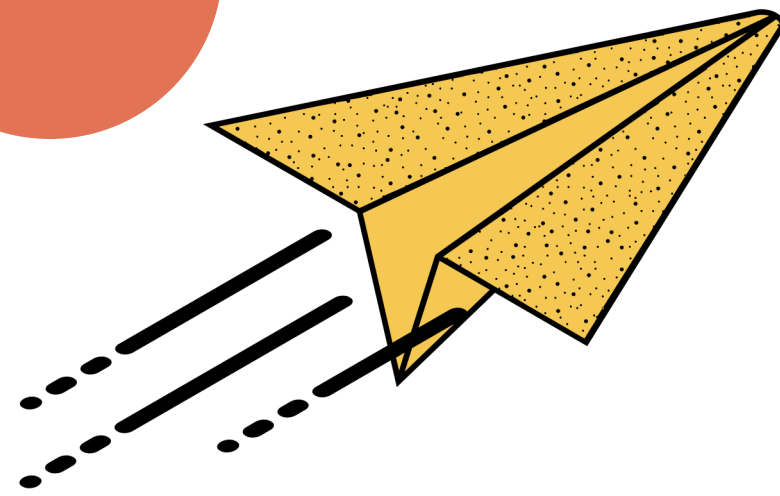
#### PASAL 4 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi meliputi:

- a. pengawasan dan pengelolaan kegiatan antikorupsi;
- b. implementasi panduan cegah korupsi;
- c. pelaksanaan program inisiatif antikorupsi;
- d. pemberian apresiasi perusahaan yang menerapkan sistem antikorupsi;
- e. KADIN Indonesia memfasilitasi kegiatan forum komunikasi antara pemerintah dengan swasta baik di tingkat nasional (sektoral) maupun daerah;
- f. penerapan *whistleblowing system*.

#### PASAL 5 PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI

- (1) Para Pihak dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antikorupsi termasuk namun tidak terbatas pada *workshop*, seminar, *focus group discussion (FGD)* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing Pihak atau secara bersama-sama.
- (2) KADIN Indonesia mendorong Anggota KADIN Indonesia untuk turut serta dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan antikorupsi termasuk



# THANK YOU!

**Komisi Pemberantasan  
Korupsi (KPK)**

Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300

Faks: (021)2557 8333

**Call Center: 198**

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

**Informasi LHKPN:**

Email : [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id)

**Informasi Gratifikasi:**

Email: [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id)

**Hubungan Masyarakat:**

Email: [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id)

**Pengaduan Dugaan Tindak  
Pidana Korupsi:**

Direktorat Pengaduan Masyarakat

PO BOX 575 Jakarta 10120

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

Email: [pengaduan@kpk.go.id](mailto:pengaduan@kpk.go.id)

